

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas wilayah dua sepertiganya adalah laut, tentu transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda perekonomian nasional, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat hubungan antar bangsa. Serta transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Kapal sebagai sarana pelayaran mempunyai peran sangat penting dalam sistem angkutan laut. Hal ini mengingat kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar dari pada sarana angkutan lainnya. Dengan demikian untuk muatan dalam jumlah besar, angkutan kapal akan lebih efisien, tenaga kerja lebih sedikit dan biaya murah. Selain itu untuk angkutan barang antar pulau atau Negara, kapal merupakan sarana yang paling sesuai.

Untuk pendukung sarana angkutan laut tersebut maka diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Dipelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar-muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi dan mengadakan perbaikan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi merupakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas dipimpin oleh seorang Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal yaitu dengan cara melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan

daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;

Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.

Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan pada kepelabuhanan dan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Dunia pelayaran selalu menghadapi resiko kehilangan nyawa, harta, dan pencemaran lingkungan. Salah satu kondisi yang paling berbahaya untuk kapal yang akan berlayar atau sedang berlayar adalah pada saat cuaca buruk, analisa kemungkinan *capsizing* kapal pada cuaca buruk lebih besar. Kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda terjadi silih berganti. Namun akar penyebab kecelakaan laut yang secara prinsip merupakan akibat regulasi yang belum ditangani secara serius oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran di atas, oleh karena itu penulis mengambil judul **“Peran Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Dalam Penanganan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat waktu Praktek Darat dan luasnya ruang lingkup tentang Kesyahbandaran, maka penulis membuat batasan-batasan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi guna menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran ?

2. Bagaimana tugas pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi terhadap kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keselamatan dalam pelayaran ?
3. Apa penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan yang dilakukan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Pelaksanaan Praktek Darat ini penulis ingin membandingkan dan mempraktekan antara teori-teori yang telah didapat dalam perkuliahan maupun studi kepustakaan, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi guna menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tugas pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi terhadap kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keselamatan dalam pelayaran.
- c. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan yang dilakukan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi.

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat bagi Akademik
 1. Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang.
 2. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak atau instansi dari tempat Praktek Darat.
 3. Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas system pendidikan di Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang.
 4. Sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan program studi Kpn.

5. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dan kesiapan taruna Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor “AMNI” Semarang.
 6. Menambah keilmuan tentang sistem dan prosedur keamanan keselamatan pelayaran
 7. Hasil penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan pendidikan
- b. Bagi Praktisi
1. Bagi Penulis
 - a. Penulis dapat memahami cara kerja dan tanggung jawab Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi guna menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.
 - b. Penulis dapat memahami tentang tugas pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi terhadap kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keselamatan dalam pelayaran.
 - c. Penulis dapat memahami faktor-faktor penyebab kecelakaan pelayaran dan cara penanganan yang dilakukan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi .
 2. Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi
 - a. Perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program kerja. Membantu dalam dunia edukatif menambah wawasan mengenai aplikasi-aplikasi secara langsung pada saat ini.
 - b. Memberikan wadah aspirasi bagi taruna dalam dunia kerja
 - c. Mendapatkan inspirasi untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program kerja.
 - d. Memacu perusahaan untuk lebih produktif dan lebih profesional.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, tentang bagaimana sistem dan prosedur untuk meningkatkan keamanan keselamatan pelayaran dimana masyarakat berperan sebagai pengguna jasa angkutan laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan susunan dan pembahasan yang sistematis, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis nantinya. Adapun sistematika penulisan yang akan dituangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, dalam bab ini dimuat kerangka atau landasan teoritis dan yuridis yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan pijakan untuk diuji dan dikembangkan

BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang sumber data dan jenis data

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan, dalam hal ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis berikut pembahasnya

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menambahkan Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas di bab 4.